

MANAJEMEN MUTU TERPADU

Teguh Sriwidadi¹

ABSTRACT

Total Quality Management (TQM) is the effort to meet or exceed the customer needs with the lowest cost. The business will be successful if it can produce an output (product and service) fit according to the customer needs. They will raise the profit if only they can operate efficiently (effective cost, avoid waste, and rework), and to ensure that all the activity directed to the effort to satisfy the customer needs.

Keywords: *Total Quality Management (TQM)*

ABSTRAK

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management - TQM) adalah upaya untuk memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Sebuah bisnis akan sukses jika bisnis tersebut dapat menghasilkan keluaran (berupa barang dan jasa) yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Bisnis akan meningkatkan keuntungannya hanya jika perusahaan tersebut mampu beroperasi dengan efisien, yaitu dengan biaya efektif, menghindari pemborosan dan kerja ulang (rework), dan memastikan bahwa semua kegiatan diarahkan pada upaya memuaskan kebutuhan pelanggan.

Kata kunci: *manajemen mutu terpadu*

¹ Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

PERANAN GENDER DALAM USAHA TANI DI KAWASAN INDONESIA BAGIAN TIMUR

Budiman Notoatmojo¹

ABSTRACT

The role of gender is dominant in agriculture development and income, especially the role of the housewife. They are dominant in house duties, controlling the financial, children's education, village or farm events, and increase the income for their families. The research's aims are to determined the role of gender in the household, farming, project activities in doing rural activities, and in increasing farmer's income based on the research done in North Sulawesi, South Sulawesi, and Gorontalo. It can be concluded that the housewife's role in doing daily chores, deciding, farming activities, doing farming activities, joining rural activities, and increasing the family income are more dominant than male.

Keywords: *gender, farm agriculture*

ABSTRAK

Peran gender sangat dominan dalam pembangunan usaha tani dan peningkatan pendapatan petani. Peran ibu rumah tangga sangat dominan dalam menyelesaikan tugas dan urusan rumah tangga, memegang kendali keuangan rumah tangga, dan mengatur pendidikan anak. Tujuan penelitian untuk menentukan peran gender dalam rumah tangga, usaha tani, kegiatan proyek dalam melakukan aktivitas pedesaan, dan dalam meningkatkan pendapatan petani berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Dapat disimpulkan bahwa peran ibu rumah tangga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, membuat keputusan, melakukan kegiatan pertanian, dan meningkatkan pendapatan lebih dominan daripada laki-laki.

Kata kunci: *peranan gender, usaha tani ternak*

¹ Peneliti Senior Balitbang, Deptan RI & Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

MODEL PENGUKURAN PRODUKTIVITAS BERDASARKAN PENDEKATAN RASIO *OUTPUT PER INPUT*

Haryadi Sarjono¹

ABSTRACT

Objective of this research is to find model which measure productivity. That measuring uses a ratio between effectivity of goal achievement as the certain quality level (output) and efficiency application of available source (input). It is concluded that (1) to increase productivity input and output are variable which must be controlled; (2) Increasing productivity can increase competitive power of a company and also can a help a company to have a new investment.

Keywords: productivity measurement model, input, output, ratio

ABSTRAK

Artikel bertujuan menemukan suatu model yang dapat mengukur produktivitas. Model menggunakan rasio antar efektivitas dan pencapaian sasaran sebagai input dan output. Disimpulkan bahwa (1) untk meningkatkan produktivitas, input dan output merupakan variable yang harus dimonitor, (2) kenaikan produksi dapat meningkatkan daya saing dan investasi perusahaan.

Kata kunci: model pengukuran produktivitas, input, output, rasio

¹ Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

MANAJEMEN LINTAS BUDAYA

Suryanto¹

ABSTRACT

This article explains about globalization versus national responsiveness matrix, meeting the challenge, cross cultural differences and similarities, parochialism and simplification, also cultural differences in selected countries and regions. The purpose of the research is to find factor, method, strategy in order to bridging management across cultural, so that a manager can have a better view in making a decision based on cultural differences and need of the company. From this article can be concluded that there are four factor that must be consider in Multi National Company (MNC). Those factors are (1) It's important to be divided in worldwide standard; (2) It's important to differennate product at the local market; (3) It's important to have insider; (4) there is one more contribution to local condition. In order to succeed in MNC, a company must survive from across cultural threat, there are parodialism and simplification.

Keywords: management, cultural

ABSTRAK

Artikel memaparkan globalization versus national responsiveness matrix, meeting the challenge, cross cultural differences and similarities, parochialism and simplification, also cultural differences in selected countries and regions. Tujuan penelitian untuk menemukan faktor, metode, strategi untuk menjembatani manajemen lintas budaya sehingga manajer memperoleh pandangan dalam membuat keputusan berdasarkan lintas budaya dan kebutuhan perusahaan. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam Multi National Company (MNC). Keempat faktor tersebut adalah (1) perlu dibagi dalam standar worldwide; (2) pentingnya diferensiasikan produk untuk pasar lokal; (3) perlunya menjadi orang dalam daripada tergantung kebijakan ekspor; dan (4) perlunya memberikan sumbangan yang lebih berarti untuk merespons kondisi lokal.

Kata kunci: manajemen, budaya

¹ Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

MERGER BANK BERMASALAH DI INDONESIA

Titik Indrawati¹

ABSTRACT

The basic of problem for direction and senior manager bank is how to maximalize the value of share owner. It focus on how to make value by merger, how to get the value of bank target, and how to consider the nonfinancial influence the value by merger. The objective of the research wrap up the traveling's merger and acquisition phenomenon in Indonesia. That objective are more focused on how merger can increase value, how to decide Bank's value and the non financial parameter that can affact the sucess of the merger comp. It's concluded that Indonesian society see Bank merger as a final action to save a Bank from Bankcoruptcy. In negotiating the merger agreement, buyer and seller must consider the financial & non financial parameters.

Keywords: bank, merger

ABSTRAK

Fokus pembahasan ditujukan pada bagaimana merger menambah nilai, bagaimana menentukan nilai bank target, serta bagaimana pertimbangan nonkeuangan mempengaruhi nilai dan sukses perusahaan baru sesudah merger.

Kata kunci: bank, merger

¹ Staf Pengajar Universitas Indonesia & Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

MENGENAL BANK “SYARIAH” LEMBAGA KEUANGAN UNTUK UMUM

Fauzi Solihin¹

ABSTRACT

The article objective is to compare Syariah banking system to common banking system. It is concluded that Syariah banking system can be alternative banking system to any body who expect profit sharing as the replacement of common interest mechanism.

Keywords: Syariah Bank

ABSTRAK

Artikel bertujuan membandingkan bank Syariah dengan bank umum. Disimpulkan bahwa sistem bank Syariah dapat menjadi suatu alternatif pengembangan usaha dengan cara pembagian laba sebagai pengganti mekanisasi bunga perbankan.

Kata kunci: Bank Syariah

¹ Staf Pengajar STIE Swadaya & Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta

HEAVY RELIANCE ON THE INDIRECT FINANCING AS SOURCES OF FUNDS FOR BUSINESS FIRMS IN JAPAN: AS A COMPARISON FOR INDONESIAN FINANCIAL CRISIS

Yulius¹

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the implication of financial liberalization to the heavy reliance of firms to the indirect finance in Japanese experience. In order to analyze the goal of this article, we start to examine the causes of the main bank system in Japan before and the pre-war period. Then, this article discusses the impacts of financial liberalization to the heavy reliance on the indirect-financing for business firms in the light with Japan's financial market, particularly the main bank system. Finally, this article also discusses the implication of loose relationship of big firms and major banks (main bank system) to the recent financial condition in starting from the early of 1990s until now. This article discovered that financial liberalization, which started at the latter half of 1970s, has shaken the foundation of the main bank system. The major firms started to less dependent on the major banks and they issued the securities in domestic and international market. As a consequence, the SMBS still depend on the banks as their source of indirect financing. However, the competitiveness in the SMBS market turned to erode the bank profits that induced them to enter the risk activities, such as real estate. In addition, the bubble burst economy also triggered the boom in real estate. Naturally, as a nature of risk asset, loan to the real estate became the potential of bad loans that also was exacerbated the bubble burst in economy. Then, the financial crisis has revealed in 1990s.

Keywords: *finance, funds, Japan, business, firm, Indonesia*

ABSTRAK

Tujuan penulisan untuk mempelajari implikasi liberalisasi finansial terhadap kepercayaan firma yang dialami Jepang. Langkah yang dilakukan adalah meneliti penyebab, implikasi, dan efek yang ditimbulkan oleh liberalisasi finansial tersebut. Dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya liberalisasi finansial tahun 1970 di Jepang banyak perusahaan di Jepang yang melepaskan ketergantungannya pada Bank dan beralih pada pasar saham nasional dan internasional. Akibatnya, bank tergantung seperti usaha pada real estate yang pada awalnya merupakan usaha yang baik karena adanya booming real estate. Namun sejak tahun 1990 usaha real estate runtuh karena adanya krisis keuangan. Untuk mengatasinya Bank tersebut bisnis untuk menghapuskan piutang, optimalisasi biaya OPS, restrukturisasi bisnisnya, mengalihkan usaha ke obligasi bahkan masuk ke sistem penyehatan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci: *finansial, dana, Jepang, bisnis, firma, Indonesia*

¹ Staf Pengajar Unika Atma Jaya, STIE Kalbe & UBiNus, Jakarta

ASPEK KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

Kadiman Pakpahan¹

ABSTRACT

Poverty can be measured by rice consumption rate indicator and income rate indicator. This article describes the major element of poverty. The major element of poverty is natural factor, cultural factor, and structural factor.

Keywords: *poverty, village*

ABSTRAK

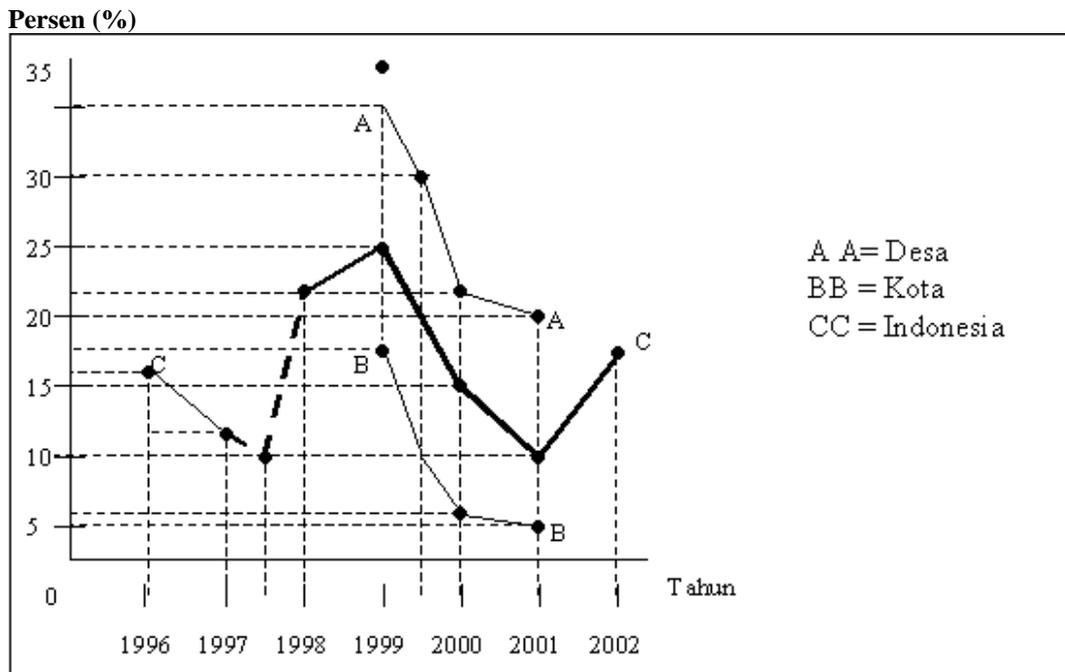
Kemiskinan dapat diukur dari angka indikator konsumsi beras dan angka indikator pendapatan. Artikel memaparkan elemen utama kemiskinan. Elemen utama kemiskinan adalah faktor natural, faktor kultural, dan faktor struktural.

Kata kunci: *kemiskinan, desa*

¹ Staf Pengajar Akademi Manajemen dan Sekretaris Syafaat Indonesia & UBiNus, Jakarta

PENDAHULUAN

Sekitar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Wilayah Indonesia terdiri dari sekitar 66.000 desa dan sekitar 19.600 tergolong desa miskin atau desa tertinggal. Semenjak dicanangkannya pembangunan dengan cara bertahap (lima tahun) pada tahun 1969 (PELITA I), ada usaha yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pengentasan kemiskinan cukup memberikan hasil. Hal itu dapat dilihat dari perubahan yang cukup besar. Jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan berkurang dari 60 persen periode 1970-1996 menjadi 11 persen (Kompas, 21 Juni 2003).



Sumber: Bank Dunia (dalam Kompas, 21 Juni 2003)

Gambar 1 Kurva Keadaan Kemiskinan di Indonesia (Februari 1996 – Februari 2002)

Memperhatikan kurva kemiskinan di Indonesia Februari 1996 – Februari 2002 terdapat trend yang pasang surut. Dampak krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan menambah jumlah masyarakat yang miskin dari 28 juta penduduk (sebelum krisis ekonomi) menjadi 36 juta penduduk. Pada kurva juga dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin terbesar terdapat di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki masyarakatnya.

Pedesaan, secara umum, memiliki keterbatasan melakukan perubahan secara mendasar dibidang sosial-budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aspek pemasaran serta kebijakan yang berpihak. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Masyarakat pedesaan sangat mendambakan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, masih cukup banyak warga pedesaan yang tidak

memiliki cita-cita (keinginan untuk berubah) khususnya masyarakat yang masih primitif dan masyarakat subsisten.

Pembangunan pedesaan untuk mengentaskan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari sumber daya utama yang ada di pedesaan, yaitu sumber daya alam. Modal sumber daya alam, basis utama sumber penghasilan adalah dari pertanian (dalam arti luas). Pembangunan pedesaan dengan basis pertanian membutuhkan syarat mutlak dan syarat pelancar. Selain memperhatikan potensi alam yang dimiliki, pedesaan juga harus memperhatikan potensi sosial-budaya, misalnya semangat gotong royong dan semangat/keinginan untuk berubah.

Potensi sosial-budaya pedesaan harus menjadi perhatian utama di dalam melakukan modernisasi pedesaan. Pembangunan yang berjalan atau yang sedang direncanakan di pedesaan harus berpedoman pada suatu prinsip, "pembangunan pedesaan: dari, oleh, untuk rakyat pedesaan". Dengan demikian, tumbuh rasa memiliki dan meningkatkan utilitas dari setiap sumber daya pedesaan. Tujuan penelitian mengungkap secara teoritis faktor penyebab kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ukuran dan Indikator Kemiskinan

I. Ukuran

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan itu melihat sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan dasar/primer dapat dibedakan menjadi berikut ini.

- a. Kebutuhan Fisik Primer: gizi, perumahan, kesehatan, dan sandang.
- b. Kebutuhan kultural: pendidikan, waktu luang, rekreasi, dan ketenangan hidup.
- c. Adanya sisa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan tidak hanya dapat dilihat secara absolut tetapi dapat diukur dengan membandingkan kelompok masyarakat/daerah tertentu dengan kelompok masyarakat atau daerah lain. Indikator itu merupakan salah satu sumber motivasi bagi masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya.

II. Indikator Kemiskinan

1. Tingkat Konsumsi Beras

Indonesia yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras sebagai sumber energi dan gizi, jika konsumsi beras masyarakat pedesaan kurang dari 320 kilogram per kapita per tahun maka masuk dalam kategori miskin.

2. Tingkat Pendapatan

Standar internasional membuat kisaran pendapatan masyarakat miskin berkisar antara US \$ 50 sampai US \$ 75 per kapita per tahun.

III. Indikator Kesejahteraan

Sasaran yang jauh lebih penting yang dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa indikator untuk mengikuti tingkat kesejahteraan, antara lain sebagai berikut.

1. Konsumsi kalori dan protein, syarat minimum yang harus dikonsumsi per hari per orang adalah sekitar 2100 kalori dan 55 gram protein.
2. Keadaan kesehatan.
 - a. Harapan hidup yang lebih lama, di negara sedang berkembang sekitar 54 tahun sementara di negara maju sekitar 71 tahun. Harapan hidup yang bertambah tinggi akan memungkinkan kontribusi produksi yang lebih besar.
 - b. Tingkat kematian bayi yang rendah di negara sedang berkembang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 110 orang bayi berumur kurang dari satu tahun dari 1000 kelahiran. Tingkat kematian bayi yang tinggi itu akan menambah beban penduduk dan kualitas hidup semakin berkurang.
 - c. Tingginya persentase penduduk yang sakit di pedesaan, ada sekitar 6,5 persen yang sakit selama seminggu terutama masyarakat berpenghasilan relatif rendah. Penduduk mengalami sakit akan menurunkan kualitas hidupnya dan produktivitas.
3. Keadaan Perumahan.

Pada umumnya, masyarakat miskin tinggal di rumah dan kualitas bangunan dan fasilitas tidak memadai. Sebagian besar warga miskin menggunakan penerangan bukan listrik, belum ada wc sendiri, dan sumber air bersih yang masih terbatas. Kualitas perumahan yang serba terbatas akan membawa implikasi kualitas hidup warga secara menyeluruh.
4. Keadaan Pendidikan.

Sebagian besar dari masyarakat miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya atau putus sekolah.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan secara teoritis dibedakan atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

1. Kemiskinan Natural (Alamiah)

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti cacat, sakit, lanjut usia, atau bencana alam.
2. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau kebiasaan seperti malas, tidak disiplin, atau pola hidup boros (konsumsi).
3. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh buatan manusia seperti ketidakmerataan distribusi aset, kebijakan ekonomi yang biasa korupsi, dan/atau tatanan perekonomian global yang menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut multidimensi sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak/masyarakat dan pemerintah.

1. Kemiskinan Alamiah

Sakit, lanjut usia, atau korban bencana alam merupakan masalah yang dapat ditanggulangi masyarakat dengan cara sendiri-sendiri. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu dan intervensi pemerintah sangat dibutuhkan. Penduduk yang cacat seumur hidup perlu disediakan jenis pekerjaan yang masih memungkinkan untuk dikerjakan dan produktif. Penduduk korban bencana alam masih dimungkinkan untuk dipindahkan (transmigrasi) dan rehabilitasi wilayah.

2. Kemiskinan Kultural

Masalah budaya atau kebiasaan hidup seperti malas, tidak disiplin, pola hidup konsumtif merupakan pemicu kemiskinan yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan terpadu. Masyarakat malas perlu didorong atau dimotivasi agar memiliki cita-cita hidup yang lebih baik. Penduduk malas perlu dicari faktor penyebabnya, apakah karena tidak didukung dinamika budaya sekitar, keterbatasan faktor pendukung (sarana produksi dan unsur pasar). Rangsangan produksi dipengaruhi ketersediaan sarana produksi dan kepastian pasar atau harga yang menguntungkan.

3. Kemiskinan Struktural

Pembahasan kemiskinan struktural ini mendapat porsi paling luas dan esensial. Masyarakat miskin membutuhkan dukungan dan perhatian yang lebih luas dari pemerintah. Usaha atau langkah yang perlu dilakukan dirinci sebagai berikut.

a. Pembangunan Pertanian

Sebagian besar (mayoritas) penduduk pedesaan menggantung hidup dari pertanian. Pembangunan pertanian harus didukung syarat mutlak, yaitu adanya pasar, teknologi yang senantiasa berubah, tersedianya sarana produksi secara lokal, rangsangan produksi, dan transportasi serta adanya syarat pelancar, yaitu pendidikan pembangunan (ketrampilan), kredit produksi, gotong royong, intensifikasi/ekstensifikasi, dan perencanaan nasional pembangunan pertanian. Pemerintah harus mampu melakukan modernisasi di bidang pertanian. Kebijakan yang diperlukan adalah adanya keamanan politik untuk melakukan tata guna tanah. Tata guna tanah memungkinkan penduduk pedesaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Penganekaragaman komoditi seseuai dengan potensi alam dan kemampuan yang dimiliki penduduk. Produktivitas lahan ditentukan juga faktor inovasi dan teknologi. Teknologi kimia (pupuk/obat-obatan) dan teknologi biologi (bibit unggul) serta mekanisasi pertanian merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Faktor yang dibutuhkan untuk membangun SDM sangat dengan kebutuhan lahiriah dan batiniah. Tersedianya kebutuhan pangan/sandang dan papan merupakan prasyarat untuk memperbaiki kualitas penduduk. Perbaikan kesehatan dan kecukupan gizi adalah cara memperbaiki fisik dan pikiran serta hati nurani penduduk dan selanjutnya dapat menambah harapan hidup penduduk. Penduduk yang sehat dan cukup gizi menjadi modal awal untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal yang tidak dapat dilupakan adanya peranan pendidikan (formal/nonformal) untuk pembaharuan (modernisasi) secara menyeluruh. Bagi penduduk pertanian atau nonpertanian memerlukan ketrampilan tambahan dan pengetahuan baru serta

wawasan yang lebih luas. Pendidikan formal diperlukan masyarakat untuk memperbaiki kualitas warga wajib belajar. Melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan lahir generasi pembaharu dan penerus modernisasi pedesaan. Wajib belajar harus menjadi program pemerintah khususnya bagi masyarakat miskin. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membebaskan masyarakat dari buta huruf dan buta informasi.

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan ekonomi masyarakat desa tidak lepas dari pengadaan infrastruktur, seperti jalan, air bersih, penerangan, dan air irigasi jalan desa akan menunjang distribusi hasil pedesaan dan mempercepat proses pemasaran ke kota. Air bersih dan penerangan akan menambah kualitas hidup penduduk. Irigasi menunjang produksi pertanian dan perikanan.

d. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah harus mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung pada proses pembangunan di pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring (pengawasan), evaluasi, dan pemeliharaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat diorganisir dengan mengoptimalkan lembaga setempat, lembaga semipemerintah, atau perorangan. Partisipasi masyarakat yang optimal akan menciptakan rasa memiliki atau bukan menjadi penonton melainkan menjadi pemain utama dalam setiap langkah pembangunan. Terkait dengan otonomi daerah maka swadaya masyarakat (khususnya penduduk yang lebih mampu) harus diprioritaskan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga untuk meningkatkan pengawasan. Selama ini, pengawasan masih unsur yang lemah sehingga sering terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dan rancangan pembangunan. Pengawasan yang lemah dari masyarakat akan meningkatkan korupsi sehingga alokasi anggaran menjadi tidak produktif. Anggaran pembangunan untuk pedesaan menjadi tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, dan disalokatif. Masyarakat harus memiliki rambu atau aturan main bagaimana mengawasi proses pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

e. Pembangunan yang Berkelanjutan

Jenis perkembangan, apapun namanya tetap harus memperhatikan kelestarian dan keserasian lingkungan. Lingkungan biotik atau abiotik merupakan sumber kehidupan sehingga pembangunan fisik atau nonfisik selalu terkait dengan kelanjutan dan keberadaan penduduk. Beberapa masalah lingkungan yang sering mengganggu kehidupan masyarakat pedesaan adalah penggundulan hutan, polusi air dan udara, pencemaran lingkungan akan menambah penderitaan masyarakat (sakit/cacat). Penggundulan hutan akan mengurangi bahkan mematikan sumber air. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas dan konsisten untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kehidupan yang perlu dilindungi tidak hanya manusia tetapi makhluk lain yang berguna dalam jangka panjang.

PENUTUP

Simpulan

Kemiskinan memiliki dimensi yang cukup luas. Ada beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras dan tingkat pendapatan. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah

meningkatkan kemampuan dasar sumber daya manusia, perubahan struktur sosial budaya masyarakat, pembangunan sumber daya fisik dan manusia, infrastruktur meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pengembangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-2. Yogyakarta: STIE YKPN.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Karya Rineka Cipta.

Todaro, Michael. 1989. *Economic Development in The Third World*. Fourth Edition. Longman Group limited London.